

8.678 Anggota Polda Jateng Belum Punya Rumah Sendiri

BOYOLALI (IM) - Sebanyak 8.678 atau 24 persen anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) saat ini belum memiliki rumah sendiri. Di antaranya ada yang tinggal di asrama, kontrak, kos maupun masih tinggal ikut orang tuanya.

Hal tersebut diungkapkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi usai mengikuti zoom meeting dengan Kapolri pada acara launching 100.000 rumah untuk Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP), di Perumahan Griya Bumi, Mojosongo, Boyolali, Jumat (4/6).

Luthfi menjelaskan, Polda Jateng memiliki 34.664 anggota. Dari jumlah tersebut yang sudah memiliki rumah sebanyak 25.986 orang atau 75,99 persen.

"Sedangkan yang belum memiliki rumah sejumlah 8.678 orang atau 24 persen. Mereka ada tinggal di asrama, mereka ada yang ngontrak, mereka ada kos bulanan, mereka ada yang ikut orang tua," ungkap Luthfi hari ini.

Oleh karena itu, pihaknya memerintahkan kepada Karo SDM Polda Jateng untuk segera kembali menggalakan kepada seluruh jajaran Polres. Juga untuk melakukan

kegiatan-kegiatan *MoU* di satuan wilayah dengan para pengembang dan developer.

"Gunanya apa. Satu menyajaterakan anggota, dua bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan dibangunnya perumahan maka perekonomian di tempat perumahan dibangun, akan bergerak dengan sendiri," kata Luthfi.

Menurutnya, program perumahan bagi anggota Polri perlu terus dilakukan. Sehingga nantinya semua anggota bisa memiliki rumah sendiri. Paling tidak ketika memasuki masa pensiun, mereka sudah punya rumah sendiri.

"Ini (program perumahan) adalah program prioritas Bapak Kapolri dalam rangka menyajaterakan anggota. Target kita minimal asrama bisa meng-over. Tidak ada lagi anggota kita yang nanti pada masa persiapan pensiun, dia masih tinggal di asrama, tapi dia sudah mempunyai rumah tetap, kegiatan tetap, sehingga nantinya kesejahteraan anggota terjamin," imbuh dia.

Dalam program 100.000 rumah untuk PNPP ini, Polda Jateng mendatangkan kuota 1.000 rumah. ● **lus**

Pesta Sabu, 3 Bandar dan Puluhan Pemakai Ditangkap Bersama Anak Istri

JAKARTA (IM) - Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap tiga bandar narkoba dan puluhan orang pemakai yang sedang berpesta sabu di sebuah vila kawasan Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Mereka yang ditangkap ada yang bersama anak dan istri.

Tiga bandar narkoba yang diamankan itu adalah berinisial HS, AR dan MS. Ketiganyamengedarkan barang haram tersebut di wilayah Bahari, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan mengatakan, kasus ini terbongkar berawal ketika tim opsional menyelidiki tiga orang tersebut. Kemudian anggota mendapat informasi bahwa mereka sedang berada di wilayah Puncak Jawa Barat.

"Selanjutnya tim menuju salah satu vila dan telah diamankan bandar narkoba beserta peserta lain keseluruhan sebanyak 60 orang," kata Guruh dalam jumpa pers di Polres Jakarta Utara, Jumat

(4/6). Guruh mengatakan, mereka ditangkap saat sedang berlibur bersama keluarga.

"Mereka *familij gathering* judulnya, berkumpul bersama keluarga, karena pada saat kami tangkap mereka bawa anak istri dan semuanya kita cek urine," kata Guruh.

Guruh mengatakan bahwa 60 orang itu terdiri dari 25 laki-laki, 15 perempuan, dan 20 anak-anak.

"Pada saat tim melakukan interogasi kepada beberapa orang di TKP, benar adanya mereka mengadakan pesta narkoba dengan berkedok liburan bersama keluarga," ucap Guruh.

Dari hasil pemeriksaan urine, 23 laki-laki dan 4 perempuan dinyatakan positif menggunakan sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu plastik sabu seberat 3,78 gram, satu plastik sabu seberat 0,48 gram, dua butir ekstasi, dan tiga alat hisap sabu. ● **lus**



IDN/ANTARA

RAZIA KONVOI KELULUSAN

Pelajar yang terjaring razia konvoi kelulusan mencium tangan orang tuanya di Polresta, Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/6). Sebanyak 27 pelajar tingkat SMK terjaring razia polisi akibat melakukan konvoi kelulusan yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan.

Pemberlakuan Ganjil Genap Jangan Buat Penumpang Numpuk di Angkutan Umum

JAKARTA (IM) - Dishub DKI Jakarta mewacanakan penerapan sistem ganjil genap (Gage) di Ibu Kota di tengah pandemi Covid-19 yang belum dapat dikendalikan. Namun Polisi pun menyarankan agar moda transportasi dilengkapi dahulu sebelum Gage diterapkan.

Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy Pramana mengingatkan agar kebijakan tersebut tak mengakibatkan penumpukan penumpang yang berpotensi menjadi kluster penyebaran Covid-19. Hampir dapat dipastikan, saat aturan Gage diterapkan maka masyarakat yang tadinya menggunakan moda transportasi pribadi bakal beralih ke moda transportasi umum.

"Jadi, memang harus dilihat kesiapannya bagaimana, jangan sampai ada penum-

pukan di moda transportasi umum," ujarnya, Jumat (4/6).

Rusdy menilai, perlu ada kajian lebih lanjut soal penerapan sistem Gage di DKI Jakarta.

Rusdy membenarkan bahwa di Jenderal Sudirman-MH Thamrin memang bisa diterapkan Gage lantaran adanya moda transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta. Namun, sejumlah kawasan lainnya masih perlu kajian lebih dalam lantaran belum lengkapnya sarana dan prasarana transportasi umum.

"Kami sarankan, rekomendasikan manakala diterapkan kembali ganjil-genap pada masa pandemi ini perlu diperhatikan juga kelengkapan sarana dan prasarana moda transportasi angkutan umum," ujarnya. ● **lus**



ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik ...

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan, laporan ICW Firli Bahuri akan diserahkan kepada Dewan Pengawas KPK yang sudah pernah menangani apa yang dilaporkan ICW.

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen (Pol) Agus Andrianto meminta institusi Polri tak ditarik-tarik terkait dugaan penerimaan gratifikasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi.

Pernyataan Agus tersebut

untuk menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal dugaan gratifikasi yang diterima Firli dari perusahaan penyewa helikopter, PT APU.

"Jangan tarik-tarik Polri. Saat ini kami fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan investasi," kata Agus saat dihubungi wartawan, Ju-

mat (4/6).

Menurut Agus, masalah tersebut sudah diselesaikan lewat sidang etik Dewan Pengawas KPK. Ia pun menyatakan, berkas laporan dari ICW akan diserahkan kepada Dewan Pengawas.

Seperti diketahui, pada September 2020, Dewas KPK sudah menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Firli setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Dewan Pengawas

"Nanti kami kembalikan ke Dewas saja. Kami sudah ditangani," ujarnya.

ICW menduga Firli Bahuri menerima gratifikasi berupa potongan harga dari PT APU

saat menyewa helikopter yang digunakan untuk perjalanan pribadinya. Atas dugaan itu serta sejumlah temuan yang berhasil dihimpun, ICW pun melaporkan Firli ke Bareskrim Polri, Kamis (3/6).

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, tindakan yang dilakukan Firli memenuhi unsur-unsur Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wana pun berpendapat, Dewas KPK semestinya menelusuri lebih lanjut informasi yang disampaikan Firli saat sidang etik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ICW, tarif helikopter yang disewa Firli mencapai Rp 39,1 juta per jam. "Kami mendapatkan in-

formasi lain dari penyedia jasa lainnya bahwa harga sewa per jamnya yaitu 2.750 dollar AS atau sekitar Rp 39,1 juta," katanya.

Sementara itu, lanjut Wana, dalam sidang etik, Firli mengatakan harga sewa helikopter ini hanya Rp 7.000.000 per jam tidak termasuk pajak. Dengan pemakaian selama empat jam, Firli hanya membayar sekitar Rp 30,8 juta.

"Kami total itu ada sebesar Rp 172,3 juta yang harusnya dibayar oleh Firli terkait dengan penyewaan helikopter tersebut. Ketika kami selisihkan harga sewa barangnya, ada sekitar Rp 141 juta yang diduga merupakan dugaan penerimaan gratifikasi atau diskon yang diterima Firli," ucap Wana. ● **lus**

Polri Usut Kasus Korupsi Beras Bansos di Kabupaten Bekasi

CIKARANG (IM) - Polisi tengah mengusut dugaan korupsi beras bantuan sosial (Bansos) yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi. Sebelumnya warga Bekasi mengeluhkan bantuan beras yang mereka terima tidak layak konsumsi.

"Kami melakukan asistensi dan back up dari teman-teman Polda Metro

Jaya dan Bareskrim Polri, penguatan terhadap penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi," ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djoko Poperawanto, di Mapolres Metro Bekasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat (4/6).

Djoko mengatakan, penyelidikan dugaan Korupsi beras bantuan sosial itu merupakan aktualisasi dari bentuk kontribusi Polri terhadap program pemerintah dalam hal ini bantuan sosial non-tunai di Kabupaten Bekasi.

Djoko berharap bantuan sosial yang dimaksud sampai ke tujuan dan bermanfaat

bagi penerima bantuan serta dilakukan tanpa ada pelanggaran maupun tindak pidana yang melanggar aturan.

"Saya sudah lihat kerja keras dari penyidik Polres dan Pak Kapolres. Saya kira mereka mampu dan mau melakukan penyelidikan ini dengan berintegritas, profesional, dan proporsional," katanya.

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan Polres Metro Bekasi ini bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana atas kasus tersebut.

Selain itu, kata Djoko, kerja sama masyarakat Kabupaten Bekasi, juga diharapkan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik sehingga dalam waktu dekat tugas penyidik terukur hingga nanti disampaikan ke masyarakat.

"Peran masyarakat juga sangat besar memberikan informasi kepada kami," ungkapnya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan mengatakan, penyidik sedang mengumpulkan data dan barang bukti serta

menyiapkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Kami akan klarifikasi dengan meminta keterangan saksi-saksi. Beberapa barang (barang bukti) juga kita kumpulkan, ini baru tahap awal penyelidikan," katanya.

Sementara terkait ada tidaknya kerugian negara, pembuktian kasus dan lainnya nanti akan disampaikan sebagaimana hasil penyelidikan. Dugaan kasus korupsi bantuan sosial non-tunai ini mencuat setelah penerima manfaat program tersebut mengeluhkan beras bantuan yang dinilai tidak layak konsumsi karena berbau dan berwarna agak kekuning-kuningan.

Sebanyak 1.130 kepala keluarga menjadi keluarga penerima manfaat program tersebut di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Perwakilan warga setempat bahkan telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Saat ini, penegak hukum tengah menyelidiki kasus tersebut. ● **lus**



IDN/ANTARA

APEL PENANGANAN COVID-19 DI KUDUS

Anggota TNI dan Satgas COVID-19 mengikuti apel dalam rangka penanganan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (4/6). Apel yang diikuti anggota TNI, Polri, dan Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto dan Kapolda Jateng Irjen. Pol. Ahmad Luthfi itu dalam rangka penngarahan penanganan kasus COVID-19 yang melonjak pascালেbaran di wilayah itu.

LOKET PELAYANAN PAJAK KENDARAAN UNTUK DISABILITAS

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berdialog dengan warga disabilitas tuli pada peluncuran loket Sistem Pelayanan Disabilitas Tuli, Lansia, Ibu Hamil, dan Menyusui (SI PEMIKAT) di Kantor Sam-sat UPTB Bapenda Sumsel wilayah Palembang VI, Jumat (4/6). Layanan loket SI PEMIKAT ini merupakan layanan loket pertama di Indonesia yang khusus melayani disabilitas dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

13 Polda akan Terapkan Tilang Elektronik Tahap 2 pada Juli 2021

JAKARTA (IM) - Sebanyak 13 Polda akan mulai menerapkan tilang elektronik tahap 2 yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2021 mendatang. Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) pun akan melakukan pemetaan titik-titik ataupun Polda yang sudah memberlakukan tilang elektronik.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono menyebutkan, ada sekitar 13 Polda yang akan menerapkan tilang elektronik tahap dua nasional. Jumlah titik pemasangan kamera bakal lebih banyak daripada tilang elektronik tahap pertama.

"Tilang elektronik tahap dua rencananya pertengahan Juli nanti, ada sekitar 13 Polda, titik ada banyak, ada penambahan tentunya. Tugas sekarang untuk memastikan, memetakan di mana-mana saja yang pasti untuk kami luncurkan. Kami matangkan benar supaya optimal pelaksanaannya," kata Istiono, tanpa merincikan ke-13 Polda yang dimaksud.

Namun Istiono mengatakan bahwa peluncurannya direncanakan pertengahan Juli di Solo, Jawa Tengah.

"Kami laksanakan di Solo, sekitar pertengahan Juli," kata Istiono.

Pada tahap pertama, tilang elektronik nasional berlaku serentak di 12 Polda se-Indonesia dengan 244 titik kamera tilang elektronik. Lokasi itu tersebar di 98 titik di Polda Metro Jaya, lima titik di Polda Riau, 55 titik di Polda Jawa Timur, 10 titik di Polda Jawa Tengah, dan 16 titik di Polda Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, 21 titik di Polda Jawa Barat, delapan titik di Polda Jambi, 10 titik di Polda Sumatera Barat, empat titik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, lima titik di Polda Lampung, 11 titik di Polda Sulawesi Utara, dan satu titik di Polda Banten.

Tilang elektronik itu menargetkan 10 pelanggaran, yakni melanggar rambu lalu-lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan ponsel.

Selain itu, yang terkena tilang elektronik adalah yang melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah,

tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

Tilang elektronik merupakan upaya penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga ke depan penegakan hukum, polisi tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Selain itu, tilang elektronik merupakan bagian dari program peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini perlu ada upaya penegakan hukum agar pengguna jalan bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan, dan menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan.

Istiono mengatakan bahwa jajarannya akan terus mengembangkan inovasi dalam rangka membangun peradaban masyarakat tertib dan patuh terhadap hukum. Terlebih di masa pandemi ini, lanjut dia, penerapan tilang elektronik sangat membantu kerja kepolisian dalam mematuhi aturan lalu-lintas.

Istiono menyebut dari hasil evaluasi tilang elektronik tahap pertama, ada peningkatan kepatuhan masyarakat berlalu lintas sekitar 40 persen, terutama di titik-titik yang terpasang kamera.

"Jadi, titik tertentu yang sudah kami pasang kamera kepatuhan masyarakat meningkat 40 persen, secara perlahan masyarakat akan patuh pada aturan ini," ujarnya.

Penerapan tilang elektronik, kata Istiono, menguntungkan polisi karena konflik kepentingan di lapangan sudah tidak ada lagi. Interaksi antara petugas dan masyarakat tidak ada. Karena dipaksa dengan aturan yang sudah jelas di lapangan.

"Kami dalam penegakan hukum menghindari kerumunan karena sidang tilang itu setiap hari 10.000, sekarang sudah tidak ada. Ini juga membantu di masa pandemi Covid-19, jadi tilang elektronik ini luar biasa yang sudah dilakukan karena terhindar dari kerumunan," katanya.

Ia menyatakan, yang terpenting penerapan tilang elektronik adalah membuat peradaban hukum. ● **lus**